

Implementasi Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease Covid-19 Berdasarkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2021

Chahyadi Roro Sakti¹, Hedy Herdiana², Harimat Hendrawan³

^{1,2,3} Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Maju, Indonesia
Corresponding author: chayadi@gmail.com

ABSTRACT

Background: Coronavirus Disease (COVID-19) is a pandemic that cannot be avoided and is endemic throughout the world, including Indonesia. Vaccination is considered the most effective effort to overcome the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to find out the Implementation of Minister of Health Regulation Number 18 of 2021 concerning Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the Coronavirus Disease COVID-19 Pandemic in Sukabumi Regency.

Method: This qualitative research was a case study approach. This research was carried out in Sukabumi Regency from July to August 2021. There were 5 informants in this research. In this study, the data collection instrument used was an in-depth interview guide assisted by a voice recorder and writing instruments. Based on the results of the COVID-19 Vaccination research in Sukabumi Regency, it provides an overview of the government procedures received by Sukabumi Regency which are suitable for administering the vaccine and how many people also justify the accuracy of related procedures.

Results: Based on the stated success of an implementation which policy sources, implementing agencies/agencies, communication, attitudes of implementers, and geographical, economic, social and political. The policy taken is quite appropriate by giving vaccines to prevent the spread and exposure of corona even though there are reasons for administering the vaccine, namely that people still do not believe in the efficacy and benefits of the vaccine, there are residents who do not administer the vaccine.

Conclusion: The policies taken were appropriate enough to provide vaccines in preventing the spread and exposure of corona even though there are reasons for administering the vaccine, namely that people still do not believe in the efficacy and benefits of the vaccine, there are residents who do not administer the vaccine.

Keywords: Permenkes Number 18 of 2021, Implementation of Vaccinations, Coronavirus Pandemic

ABSTRAK

Latar Belakang: Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan pandemi yang tidak bisa dihindari dan melanda diseluruh bumi termasuk Indonesia. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease COVID-19 di Kabupaten Sukabumi.

Metode: Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi pada bulan Juli – Agustus 2021. Informan penelitian ini sebanyak 5 informan. Untuk telaah mengumpulkan instrumen pendataan menggunakan panduan tanya jawab komprehensif serta menggunakan perlengkapan perekaman suara serta peralatan menulis. Berdasarkan hasil penelitian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi memberikan pandangan dalam prosedur pemerintah yang diterimanya oleh Kabupaten Sukabumi sesuai untuk pemberian vaksinnnya serta berapa masyarakatnya juga membenarkannya ketepatan dalam prosedur terkait.

Hasil: Berdasarkan yang dikemukakan keberhasilan suatu implementasi, yaitu sumber-sumber kebijakan, badan/instansi pelaksana, komunikasi, sikap para pelaksana, dan geografis, ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan yang diambil sudah cukup tepat dengan memberikan vaksin dalam mencegah penyebaran serta terpaparnya corona meskipun terdapat penyebab untuk penyelenggaraan vaksinnya yaitu masyarakatnya masih tidak percaya akan khasiat serta manfaatnya vaksinnya terdapat warganya tidak melakukan pemberian vaksinnya.

Kesimpulan: Penelitian ini memberikan kebijakan yang diambil sudah cukup tepat dengan memberikan vaksin dalam mencegah penyebaran serta terpaparnya corona meskipun terdapat penyebab untuk penyelenggaraan vaksinnya yaitu masyarakatnya masih tidak percaya akan khasiat serta manfaatnya vaksinnya terdapat warganya tidak melakukan pemberian vaksinnya.

Kata Kunci: Permenkes Nomor 18 Tahun 2021, Pelaksanaan Vaksinasi, Pandemi Coronavirus

©2022 Author

Under the licence CC BY-SA 4.0

BACKGROUND

Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan pandemi yang belum dapat terhidari berserta mewabah diseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus korona sebagai wabah untuk mendeteksi gejalanya dapat menularkan melalui udara yang terhirup kejalan nafas. Untuk wabah tersebut terjadi dicina.(Dwianto, 2020)

WHO (*World Health Organization*) menyatakann virus korona ialah suatu wabah dunia serta diIndonesia suatu kemunculan wabah yang daruat medis dan wabah bukan dari alam, yang bisa menyebabkan meninggal tetapi terdapat aspek merugikan perekonomian sangat luas. Pandemi korona disebabkan gejala medis oleh penduduk Indonesia serta berdampak merugikan perekonomian yang luas untuk negeri, serta aspek meningkatannya derajat medis penduduk bisa terganggu untuk pemasukan perencanaan negeri.(Aminah & Amaliyah, 2021)

Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Upaya pemerintah salah satunya menetapkan kegiatan pembelajaran dan bekerja secara *daring* (dalam jaringan), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.³ Selain itu, upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19 yaitu Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021

tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 *Coronavirus Disease 2019* dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Hida, 2022)

Pada awal Tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kontrak pengadaan vaksin COVID-19 dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca dan BioNTech-Pfizer. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Melalui vaksinasi, diharapkan dapat terbentuk *herd immunity* yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal terhadap suatu penyakit menular. (Armanto Makmum & Siti Dadhilah Hazhiyah, 2020)

Data sasaran dan pencapaian vaksin COVID-19 per 27 Juli 2021 di Indonesia yaitu untuk sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa, vaksinasi dosis 1 sebanyak 44.551.337 (21,39%) jiwa dan dosis 2 sebanyak 17.933.565 (8,61%). target serta tercapainya vaksinnya korona di Provinsi Jawa Barat yaitu untuk target vaksinasinya sebesar 37.907.814 jiwa, vaksinasi dosisnya 1 sebanyak 5.409.958 (14,27%) jiwa dan dosis 2 sebanyak 2.056.333 (5,42%). Sasaran dan pencapaian vaksin COVID-19 di Kabupaten Sukabumi yaitu untuk sasaran vaksinasi sebanyak 1.672.214 jiwa, vaksinasi dosis 1 sebanyak 232.440 (13,90%) jiwa dan dosis 2 sebanyak 72.305 (4,32%). (Armanto Makmum & Siti Dadhilah Hazhiyah, 2020)

Tujuan pemberian vaksin COVID-19 yaitu untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Pro dan Kontra vaksinasi COVID-19 membuat pelaksanaan vaksinasi mengalami hambatan sehingga pemerintah menetapkan aturan baru untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sukabumi dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2020. Selain itu sesuai dengan Surat Perintah tugas Bupati Sukabumi Nomor 800/5901-um yaitu memerintahkan dalam melakukan upaya-upaya dalam rangka penanganan dan pengendalian Covid-19 dengan Vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sector, melakukan penggalan sasaran vaksinasi dan pencapaian sasaran vaksinasi, memastikan pencapaian target vaksinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. (Syariah et al., 2022)

Pandemi COVID-19 yang telah mewabah di dunia termasuk Indonesia telah memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang kesehatan, politik, pendidikan, hingga ekonomi, kemudian wabah pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Penyebaran virus yang sangat cepat saat ini masuk pada varian delta

menyebabkan peningkatan upaya dan gerak cepat dalam pencegahannya. Vaksinasi merupakan alternatif untuk memberikan imunitas bagi masyarakat dalam menghadapi virus COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2021 dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021.

Kejadian penyebaran virus di Kabupaten Sukabumi per 27 Juli 2021 dari Satuan Tugas (SATGAS) penanggulangan COVID-19 Kabupaten Sukabumi menyebutkan data pasien cukup tinggi. Pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan total 3.897 orang yaitu 444 orang aktif, 3.359 orang sembuh dan 83 orang meninggal. Untuk keadaan *probable* dengan total 255 orang yaitu 16 orang isolasi, 116 sembuh dan 123 orang meninggal. Untuk keadaan suspek dengan total 5.343 orang yaitu isolasi 161 orang dan *discarded* 5.154 orang. Untuk keadaan kontak erat dengan total 2.042 orang yaitu 1.393 orang *discarded* sembuh dan 608 orang karantina. Peningkatan kasus luar biasa tersebut membuat Bupati Sukabumi sebagai penanggung jawab Satgas COVID-19 untuk memberikan perintah kepada seluruh jajaran kesehatan hingga ke masyarakat untuk membantu mempercepat kegiatan vaksinasi di daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* COVID-19 di Kabupaten Sukabumi.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, ditujukan agar mendefinisikan ataupun menggambarkan kenyataan kesosialan yang terjalin terdapat dimasyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi pada bulan Juli – Agustus 2021. (Saryono & Anggraeni, 2013)

Sampel dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 8 Prinsip kesesuaian mengacu pada pemilihan informan berdasarkan relevansinya dengan topik telaah. Untuk mematuhi prinsip keselarasan, telaah mencari narasumber kunci yang memiliki signifikansi atau keahlian terkait dengan materi subjek penelitian yaitu Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi, Ketua Tim Vaksinasi Kabupaten Sukabumi, Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi dan masyarakat yang sudah di vaksinasi. (Bungin, 2017)

Pengukuran dan Prosedur

Pengamatan langsung dilakukan di Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara juga dilakukan untuk pengumpulan data. Dialog tersebut terjadi antara dua individu yaitu pewawancara untuk menyampaikan pertanyaan serta narasumber untuk pemberian respons terhadap pertanyaan yang diajukan. Informasi dari lima narasumber diperoleh melalui tanya jawab komprehensif (*in-depth interview*) dengan bebas serta tidak secara kekhususan. (Wijaya, 2018) Telaah dokumen menggunakan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen. Hasil wawancara dalam penelitian ini dikumpulkan dan dijelaskan berdasarkan ekspresi, bahasa, pilihan kata, atau konsep asli dari narasumber. (Bungin, 2007)

Analisis dan etika penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berfokus dalam bentuk induksi-interpretasi-konseptualisasi. Analisis data dalam penelitian ini antara lain, meliputi Triangulasi sebagai teknik pengecekan keabsahan penggunaan pendataan dengan berulang-ulang dalam mendapatkan data serta menganalisis data. Teknik ini untuk pengujian kredibilitas data dengan mengecek sesuai dengan sumber datanya. (Alfansyur & Mariyani, 2020)

Interpretasi data berarti pengembangan ide berdasarkan *findings* yakni judul/skema serta *framework*, serta menggabungkan dari kerangka konsep sangat luasnya serta komprehensif. Klarifikasi melakukan kolaborasi serta kemudian menganalisis pendataan meyakinkan telaah menyelesaikan, komplit serta akurat. Klarifikasi pendataan bisa mempunyai makna pencarian perihal kebaruan, keunikan ataupun bermakna. (Bungin, 2007). Penelitian ini sudah lolos uji etik pada komisi etik UIMA dengan No.5890/Sket/Ka-Dept/RE/UIMA/VIII/2023.

RESULTS

Sumber Daya Manusia

Studi ini menemukan bahwa berdasarkan pernyataan informan diperoleh informasi mengenai sumber daya manusia terkait pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi, berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk jumlah tenaga (sebagai pelaksana) di tingkat kecamatan yaitu tenaga dari puskesmas yang meliputi pendaftaran, skrining yang dilaksanakan oleh dokter, penyuntikan dan observasi. Untuk jumlah tenaga vaksinasi kita sudah mencukupi. Pengaturan pekerjaan dilaksanakan oleh koordinator yang bertanggungjawab atas tata kelola di Puskesmas, dan umumnya beliau yang memberikan uraian terhadap saya. Sebelum pelaksanaan aktivitas tersebut, kami memberikan pendampingan seperti penilaian performa, jika terjadi penurunan pencapaian target, misalnya bagaimana strategi untuk mengajak masyarakat datang ke puskesmas. Solusi tersebut kemudian akan

disampaikan oleh penanggung jawab kepada kader, tokoh masyarakat, dan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, kami melakukan pemeliharaan terhadap vaksin dan masih banyak hal lain, tetapi contohnya seperti itu. Selama pelaksanaan kegiatan, kadang-kadang terselenggara dengan baik, kadang-kadang belum terlaksana dengan baik penyebabnya cuacanya, misalnya hujan deras maupun rintik-rintik, habisnya persediaan vaksin, dan masalah lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami memindahkan masyarakat ke pos atau lokasi lain yang terdekat. (Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) untuk kegiatan atau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sudah mencukupi yang terdiri dari bagian pendaftaran, bagian verifikasi, bagian skrining, bagian penyuntikan, dan bagian observasi. Perihal tersebut tingkat pelaksanaan aktivitas vaksinasi di tingkat kecamatan. Meskipun jumlah staf vaksinasi dianggap mencukupi, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan vaksinasi. Koordinator yang bertanggung jawab atas tata kelola di Puskesmas memiliki peran penting dalam organisasi pekerjaan. Namun, pelaksanaan aktivitas vaksinasi terkadang tidak konsisten dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, persediaan vaksin, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa aktivitas vaksinasi dapat berjalan lancar dan efisien, tanpa terpengaruh oleh hambatan potensial seperti cuaca buruk atau keterbatasan pasokan vaksin. (Penyimpanan et al., 2023).

Perancangan yang dihasilkan oleh pemerintah mengenai agenda peningkatan tenaga medis tahun 2011-2025, (YS Romadhona, 2018) terdapat penekanan pada pembaharuan serta pengamatan peringkat tenaga medis. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Tujuannya yaitu untuk mendorong menyelenggarakan layanan medis untuk semua masyarakat Indonesia. Sesuai temuan tanya jawab komprehensif dengan seorang narasumber mengungkapkan:

"Sehubungan dengan pelatihan, saya merupakan penerima pelatihan. Saya bertugas sebagai koordinator. Saya memberikan bimbingan kepada mereka, terutama terkait vaksinasi. Pelatihan ini diadakan setahun sekali dan saya yang mengorganisasikannya karena saya juga yang mengatur vaksinasi. Pelatihan itu sudah diperoleh 12 bulan sekali dan dilaksanakan dikarenakan untuk penjadwalan vaksinnya. Pelatihan itu sudah didapatkan setahun sekali dan dilakukan karena saya juga yang mengatur vaksin. Pembinaan diberikan setiap tahun baik itu dari Dinas Kesehatan maupun dari tingkat Puskesmas untuk setiap karyawannya, khususnya sekarang untuk tim vaksinasi COVID-19." (Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

Dalam situasi menangani pandemi COVID-19, pelatihan bagi tim vaksinasi memegang peran penting. Namun, hasil wawancara menunjukkan beberapa isu yang

perlu diperhatikan. Pertama, frekuensi pelatihan yang hanya dilakukan sekali dalam setahun mungkin tidak cukup mengingat permintaan yang tinggi akan vaksinasi. Kedua, pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis vaksin dan mekanisme kerjanya sangat penting untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat dengan tepat. Selain itu, penting juga untuk memiliki panduan yang jelas tentang penanganan efek samping vaksin. Ketiga, tersedianya sumber daya, termasuk persediaan vaksin, harus dijamin agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Terakhir, koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, dan tim vaksinasi, menjadi faktor kunci keberhasilan program vaksinasi. Dengan mengatasi permasalahan ini, program vaksinasi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses vaksinasi.

Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana dan prasarana kegiatan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi diperoleh informasi sebagai berikut.

“Untuk sarana kita sudah lengkap ada vaksinnya, termosnya. Kemudian untuk cek tekanan darah serta format dan kartu vaksin. Tempatnya kami di kantor balai desa atau tempat – tempat strategis yang telah disepakati bersama untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini.” (Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

“Karena sebagian besar pelaksanaan vaksinasi dilakukan di ruangan besar, sebelumnya kita atau pihak puskesmas berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa, kader kesehatan, ataupun tokoh masyarakat dalam rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi untuk persiapan sarana dan prasarana di tempat vaksinasi, saya kira sudah siap dalam pelaksanaan vaksinasi. Begitu juga dengan jadwal vaksinasi yang telah diinformasikan jauh jauh hari sebelum pelaksanaan.” (Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

Sarana dan prasarana terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi diharuskan mempunyai fasilitas serta perlengkapan untuk pendukung aktivitas dalam tiap jadwal kesehatannya. Perihal berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tingkat kecamatan. Dalam konteks ini, kerjasama dengan pihak puskesmas, desa, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat memiliki peran yang signifikan. Meskipun persiapan fasilitas dan infrastruktur di tempat vaksinasi telah dilakukan sebelumnya dan jadwal vaksinasi telah disosialisasikan secara memadai, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Perlu ditingkatkan koordinasi yang efisien dan berkelanjutan antara berbagai pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, peninjauan ulang atas kesiapan tempat vaksinasi untuk memenuhi standar yang diperlukan guna mencegah potensi kendala selama pelaksanaan, seperti antrean panjang atau keterbatasan ruang. Evaluasi yang cermat akan menjadi langkah penting dalam memastikan suksesnya program vaksinasi COVID-19 di tingkat kecamatan ini.

Perencanaan dan Pelaksanaan Vaksinasi

Informasi dari Ketua Satgas Kabupaten Sukabumi ditujukan untuk mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pemerintah terkait vaksinasi COVID-19.

"Kabupaten Sukabumi mengintegrasikan implementasi vaksinasi COVID-19 sebagai elemen dari pendekatan pencegahan pandemi COVID-19. Penerapan vaksinasi bertujuan untuk menjaga masyarakat dari penularan Virus korona yang mengakibatkan penyakit dan kematian akibat virus tersebut. Namun, jika cakupan vaksinasi rendah dan tidak merata, artinya sejumlah besar warga tidak menerima vaksinasi, maka dampaknya adalah tidak terbentuknya kekebalan kelompok yang dapat mengekang penyebaran virus, tidak terputusnya rantai penularan, dan akhirnya pandemi tidak dapat dikendalikan karena kurangnya imunitas komunal. Selain itu, produktivitas juga berpotensi menurun, yang berimplikasi pada dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar, selain dampak kesehatan. Namun, penting untuk diingat bahwa ketersediaan vaksin masih terbatas, sehingga pemberian vaksin dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pemberian vaksin harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, termasuk penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter." Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

Pelaksanaan vaksinasi memerlukan perencanaan. Dalam merencanakan vaksinasi membuat suatu tim serta penjadwalan dan kebutuhan vaksinasi berikut hasil wawancara dari tim vaksinasi:

"Sebelum melaksanakan vaksinasi, kita telah menyusun rencana terlebih dahulu. Kemudian, kita melakukan langkah-langkah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan di lapangan melibatkan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, berkomunikasi dengan Ketua RT untuk bantuan, menyiapkan daftar sasaran berdasarkan usia, serta mempersiapkan logistik vaksinasi, termasuk peralatan dan vaksin. Selain itu, juga melakukan pencatatan dan pelaporan setelah kegiatan vaksinasi selesai. Semua ini merupakan tanggung jawab puskesmas." Terjemahan ini memberikan kontras antara perencanaan yang dilakukan sebelumnya dengan langkah-langkah implementasi yang dilakukan di lapangan. (Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi COVID-19 Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukabumi)

Berdasarkan hasil wawancara di atas Langkah-langkah sesuai dengan rencana tersebut dijalankan, melibatkan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, berkomunikasi dengan Ketua RT untuk bantuan, menentukan sasaran berdasarkan usia, dan mempersiapkan segala perlengkapan serta vaksin. Setelah pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab puskesmas. Terjemahan ini menggambarkan kontras antara perencanaan awal dan pelaksanaan di lapangan.

Seluruh tahapan sesuai dengan rencana tersebut diimplementasikan, untuk menentukan target sasaran berdasarkan usia, serta menyediakan semua peralatan dan

vaksin yang diperlukan. Setelah pelaksanaan vaksinasi selesai, pencatatan dan pelaporan menjadi bagian yang tak kalah penting dalam tugas puskesmas. Keseluruhan proses ini menunjukkan perbedaan antara perencanaan yang telah disusun dengan baik dan bagaimana pelaksanaannya berlangsung di lapangan. Perihal sesuai hasil wawancara menyatakan:

“penjadwalan dilakukan dari mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan itu sudah dilaksanakan.” Guna membantu merencanakan acara ini, saya mengundang kepala Puskesmas. Tugasnya mengoreksi mereka yang tahu mana yang perlu dan mana yang tidak. Perencanaan pelaksanaan kampanye vaksinasi dimulai dengan penyusunan rencana vaksinasi di lapangan, perhitungan jumlah sasaran, objek, kebutuhan vaksin, kebutuhan logistik, permintaan dan pengiriman vaksin, penyusunan rencana kerja, penyusunan rencana pelaksanaan kampanye vaksinasi hingga pencatatan dan laporan, pra-pembukaan, Persiapan pembukaan dan setelah pembukaan, dan kegiatan lainnya, yaitu bagaimana memberitahukan dan berkoordinasi dengan departemen pemerintah seperti kepala desa dan stafnya, konsultasi, merencanakan kegiatan pembersihan, serta lainnya”. (Kepala Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

Penjadwalan kegiatan vaksinasi dimulai dari pukul 08.00 pagi hingga selesai. Vaksinasi tidak dilaksanakan di puskesmas untuk mencegah penyebaran penyakit baru ke masyarakat. Di luar gedung, pelaksanaan vaksinasi telah diatur sebelumnya dan lokasinya dipilih secara strategis, seperti di kantor desa atau tempat lain yang telah disetujui bersama. Diluar gedung, pelaksanaan vaksinasi melibatkan beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, skrining, penyuntikan, dan observasi.

“Pelaksanaannya rutin, jika saya yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan vaksinnya dikarenakan penyimpanannya di puskesmas, saya membawa termos dan juga data sasaran vaksinasi dalam bentuk kertas. Kader, tokoh masyarakat, dan pihak lintas sektor hanya membantu mengajak masyarakat datang ke lokasi vaksinasi tanpa menyuntikkan vaksin sendiri. (Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sukabumi)

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan vaksinasi telah berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pendaftaran hingga observasi dalam upaya vaksinasi COVID-19. (Wahyuni et al., 2021)

Promosi Kesehatan Tentang Vaksinasi

Dalam rangka meningkatkan tingkat penerimaan vaksinasi di masyarakat, pentingnya mendukung dan mengoordinasikan upaya para penanggung jawab di berbagai tingkat administratif menjadi sangat jelas. Tindakan isolasi terhadap individu yang menolak vaksinasi, yang merupakan bagian dari strategi ini, membutuhkan peran penting dari koordinator dalam memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai vaksinasi kepada individu yang menolaknya. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi

cara koordinasi lintas sektor dilakukan, dengan pertemuan virtual menjadi alternatif utama, meskipun terkadang pertemuan langsung terbatas karena kesibukan pekerjaan. Meskipun demikian, komitmen untuk melaksanakan isolasi penolakan vaksinasi sesuai dengan rencana tetap dipegang teguh sebagai bagian dari strategi promosi kesehatan guna meningkatkan tingkat penerimaan vaksinasi di masyarakat, dengan fokus pada pentingnya vaksinasi dalam upaya pencegahan penyakit. Berikut hasil wawancara

“Ooh... aktivitas yaitu isolasi penolakan vaksinasi itu dilaksanakan. dikarenakan saya juga mendukung terhadap tiap penanggung jawabnya di wilayah kabupaten ataupun tingkat kecamatan dan di tingkat desa harus itu melakukan isolasi penolakan vaksinasi Terhadap penduduk untuk dilakukan pembimbingan dari koordinatornya. Untuk koordinasi lintas sektor dilaksanakan 12 bulan 1 kali terkadang terbatas untuk melakukannya dikarenakan terdapatnya perkembangan digital dalam bentuk virtual untuk pertemuannya. Bila ketemu terkadang tidak bertemu dikarenakan aktivitas kerja masing-masing”. (Kepala Satuan Gugus Tugas Anti-Vaksinasi Kabupaten Sukabumi)

“Yang menyebarkan penyakit itu semua kalangan ataupun instansi – instansi untuk penyebarannya terkadang tiap hari terkadang menyebarkannya langsung mulai aktivitasnya. Dikarenakan keinginannya (warganya) yang sakit berkulturnya jadi bisa langsung diberikan banyak juga orangnya yang berkunjung untuk pengobatan. Bila berkunjung sangat kecil kami tidak melaksanakannya dikarenakan pimpinan berkeinginan untuk melanutkan kedaerah lainnya. Dan vaksinasi itu penting disebarkan biar mereka tahu”. (Kepala Satuan Gugus Tugas Anti-Vaksinasi Kabupaten Sukabumi)

Kunjungan medis yang tidak teratur dan tingkat kehadiran pasien yang bervariasi dapat berkontribusi secara signifikan pada penyebaran penyakit. Selain itu, kebijakan yang tidak jelas tentang kelanjutan aktivitas di wilayah lain juga dapat menjadi masalah. Oleh karena itu, tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menyebarkan informasi penting tentang vaksinasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam pencegahan penyakit. (sesuai hasil wawancara)

Kerja Sama Antar Lintas Sektor

Kerja sama antar lintas sektor (KALS) adalah pendekatan yang esensial dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks ini, berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, bergandengan tangan untuk mengatasi tantangan kesehatan dengan cara yang terintegrasi. Sebagai contoh, kolaborasi antara instansi kesehatan, lembaga pendidikan, dan kelompok lingkungan untuk mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah-sekolah adalah implementasi nyata dari pendekatan KALS. Dengan menggabungkan sumber daya dan pengetahuan dari berbagai sektor, KALS dapat menciptakan sinergi yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19, di mana tantangan

kesehatan juga berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi yang rumit, kerja sama lintas sektor menjadi semakin penting dalam merancang solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut hasil wawancara yang penelaah dapatkan:

“Permasalahan berkoodirnasi oleh lintas sektor buruk, terdapat permasalahan. Kami juga tidak pernah terinfokan dan undangan untuk mereka untuk aktivitas dalam melaksanakannya misalnya penyebaran vaksinasinya. Melakukan rapat selama 13 minggu di minilok triwulan. Untuk rapat yang diicarakan mengenai temuan aktivitas diwilayahnya. Bila pencapaian belum tercapai tim untuk memberikan jalan keluar kepada mereka”. (Ketua Tim Pelaksana Penyebaran Penyakit COVID-19 Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukabumi)

“Ooh itu terdapatnya agenda misalnya pengadaaan tiap 12 bulan 1 kali diadakan rapat untuk pembahasan pedanaan ABD kemudian melibatkan terhadap kader untuk rapat tersebut namun aktivitasnya tidak tiap harinya. Untuk lintas sektor terdapat agenda MMD (program bidan desa) tim membuatkan perencanaannya untuk rapat dengan mereka 12 bulan untuk bidan desa tim bertugas mengkoordinasi”. (Ketua Tim Pelaksana Penyebaran Penyakit COVID-19 Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukabumi)

Terkait berkerjasama lintas sektor serta aktivitas vaksinasi, temuan implementasi cukup bagus, pertemuan dijadwalkan 14 hari sebelumnya dan pertemuan dilakukan setiap tiga bulan sekali. (sesuai hasil wawancara)

Kondisi Sosial, Geografis dan Pendidikan

Banyaknya pihak yang meragukan keefektifan dan kemanjuran vaksin korona . Seberapa dari perorangan terpadat penolakan dalam vaksinnya. Vaksin Sinovac untuk vaksinasi korona telah menjalani uji klinis dalam beberapa tahap dan telah mendapatkan izinnya melalui BPOM serta MUI. Meski begitu, ada beberapa perdebatan di antara mereka yang menolak vaksin korona . Selain itu, ada kendala lain seperti persediaan vaksin yang terbatas, pendistribusian vaksin korona , terkadang harus menunggu berhari-hari ketika vaksin habis, bahkan nomor antrean daftar vaksin tidak tersedia karena banyak orang, ini mempengaruhi terhadap capaian vaksin di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ketua Tim Vaksinasi di tingkat Kecamatan dan Puskesmas, mengatakan bahwa :

“Vaksinasi COVID-19 memiliki signifikansi yang sangat penting bagi kita sebagai anggota masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi mereka yang sudah menerima dosis pertama vaksin, sangat disarankan untuk melanjutkan dengan dosis kedua. Tidak melakukannya akan mengakibatkan kekebalan yang tidak lengkap. Individu yang telah diundang untuk dosis kedua harus mengikutinya tanpa pengecualian. Sebelum memberikan vaksin, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengatasi segala kekhawatiran atau keluhan dari individu, memastikan bahwa vaksinasi dilakukan dengan tepat.” (Anggota Masyarakat yang Telah Divaksinasi)

"Di kecamatan kami, hanya sekitar 40% dari populasi yang ditargetkan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Tingkat vaksinasi yang rendah ini bisa disebabkan oleh pasokan vaksin yang terbatas, yang datang secara bertahap. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh penduduk, seperti jadwal yang padat dan masalah kesehatan, telah berkontribusi pada tingkat vaksinasi yang rendah, meskipun petugas kesehatan sudah siap. Selain itu, sebagian besar wilayah kami ditandai oleh medan pegunungan, dengan pemukiman yang tersebar atau terpencil serta akses jalan yang sulit, yang semakin mempersulit situasi." (Anggota Masyarakat yang Telah Divaksinasi)

Lebih lanjut, ditekankan bahwa tidak perlu merasa cemas terkait vaksinasi. Vaksin telah melewati uji coba dan penelitian yang ketat, menjamin keamanan dan efikasinya. Disarankan agar tidak membiarkan informasi yang salah mempengaruhi individu untuk tidak divaksinasi, dan keraguan apa pun sebaiknya langsung dibahas dengan para profesional kesehatan yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang proses vaksinasi." (Anggota Masyarakat yang Telah Divaksinasi)

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi dapat diperinci ke dalam beberapa aspek utama, seperti sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, kinerja kebijakan publik, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah uraian lebih lanjut untuk masing-masing aspek tersebut:

Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan merujuk pada landasan hukum dan dasar kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Kebijakan ini dapat berakar pada peraturan nasional, peraturan daerah, atau pedoman dari organisasi kesehatan global. (Syakti et al., 2023). Pentingnya sumber-sumber kebijakan ini adalah untuk memberikan kerangka hukum yang kuat yang mendukung pelaksanaan vaksinasi. Evaluasi yang cermat terhadap sumber-sumber kebijakan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan situasi lokal dan dapat dijalankan dengan efektif. Sumber daya manusia sangat berperan dalam proses terlaksananya Vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini, seluruh elemen atau instansi ikut berperan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan yaitu tenaga kesehatan di Tingkat Puskesmas atau Kecamatan, karena hal ini lebih langsung dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Berdasarkan Data Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2022. fasilitas juga sangat berperan dalam tercapainya implementasikan vaksinya korona ini. Standarisasi serta spesifikasi peralatan vaksinasi dan vaksin yang dimiliki merupakan suatu persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyediaan peralatan vaksinasi dalam terlaksananya

Vaksinasi COVID-19. Sarana dan prasarana untuk mempunyai dengan kejadian sangat bagus menyesuaikan oleh tanggung jawab pemakaiannya.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana mencakup elemen-elemen seperti jumlah personel, pengalaman, dan ketersediaan sumber daya. Pada titik ini, esensial untuk memverifikasi bahwa badan pelaksana memiliki jumlah staf yang memadai dan terlatih untuk menjalankan program vaksinasi dengan baik. Tak kalah pentingnya adalah ketersediaan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan, termasuk penyimpanan vaksin yang tepat, yang harus mudah diakses dan digunakan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Farmasi Pada Prodi III Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan & Elleniyati, 2018) yang menyebutkan bahwa sasaran untuk setiap jenis kegiatan pelayanan imunisasi dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk, penambahan penduduk serta angka kelahiran dari hasil sensus penduduk atau Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh BPS.

Sikap Para Pelaksana

Sikap dan motivasi para pelaksana vaksinasi, seperti tenaga kesehatan, relawan, dan kader kesehatan, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kesuksesan implementasi. Sikap yang positif dan komitmen untuk memberikan vaksin kepada masyarakat adalah faktor kunci. Diperlukan pendekatan efektif dalam memberikan pelatihan, pemahaman, dan dukungan kepada para pelaksana agar mereka tetap termotivasi dan melaksanakan vaksinasi dengan baik. Sikap untuk melakukan peraturan ialah aspek terkait tiga dari pendekatannya tentang melakukan suatu peraturan publiknya. Untuk melakukan strateginya, Kabupaten Sukabumi berpedoman pada Permenkes No. 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease COVID-19. (Anggareny & Pitriana, 2021) tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pemerintah diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan tujuan bernegara dan mengkonstruksikan tujuan penyelesaian COVID-19 dengan memaksakan logika pasar kepada rakyatnya. Jika menggunakan logika pasar, maka pasar memiliki kekuasaan “mengendalikan” negara untuk menyediakan semua komoditas yang mendukung keberlangsungan pasar (kapitalisme). Dukungan tersebut berupa pembangunan infrastruktur, kebijakan kompetisi dan segala urusan yang terkait dengan kepentingan pasar.

Kinerja Kebijakan Publik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Sukabumi dapat memengaruhi pelaksanaan vaksinasi. Ketersediaan anggaran dan sumber daya, aksesibilitas layanan kesehatan oleh masyarakat, serta dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah, semuanya dapat memengaruhi keberhasilan vaksinasi. Faktor-faktor sosial dan budaya juga dapat memengaruhi tingkat penerimaan vaksinasi. Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do). Kebijakan Publik memiliki karakteristik Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan dan Berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah (Rahayu, 2023).

CONCLUSION

Simpulan dari penelaah mengenai implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi dapat dirangkum sebagai berikut:

Aspek Penting: Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan vaksinasi COVID-19, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Ini termasuk sumber-sumber kebijakan yang memberikan dasar hukum, karakteristik badan pelaksana yang melibatkan sumber daya dan infrastruktur, sikap positif dan motivasi para pelaksana, serta kinerja kebijakan publik dalam mencapai target vaksinasi.

Kerja Sama Antar Sektor: Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, harus bekerja sama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengatasi tantangan yang rumit.

Tantangan Lokal yang Diperhatikan: Kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Sukabumi memengaruhi pelaksanaan vaksinasi. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dukungan politik, dan faktor budaya memainkan peran penting dalam tingkat penerimaan vaksinasi.

Peran Para Pelaksana: Sikap dan komitmen para pelaksana vaksinasi memiliki dampak yang signifikan. Pelatihan, dukungan, dan pemahaman yang diberikan kepada mereka dapat meningkatkan motivasi mereka dalam memberikan vaksin kepada masyarakat.

Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi. Ini mencakup pemantauan pencapaian target, pengukuran kinerja, dan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat penerimaan dan efektivitas vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi, penting untuk terus mengidentifikasi hambatan, memperkuat

kerja sama antar sektor, dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para pelaksana vaksinasi. Dengan mengatasi aspek-aspek ini, diharapkan vaksinasi dapat berjalan lebih lancar dan berkontribusi pada upaya pencegahan penyebaran virus korona di komunitas tersebut.

1 b REFERENCES

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Aminah, A., & Amaliyah, E. (2021). Knowledge, Attitudes and Behavior of Nursing Students Towards the Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(1), 91–96. <https://doi.org/10.30604/jika.v6i1.436>
- Anggareny, W., & Pitriana, P. (2021). Upaya Pemberian Pelayanan Berkualitas Pada Program Gebyar Vaksinasi di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 26(14), 1–9. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/358/317>
- Armanto Makmum, & Siti Dadhilah Hazhiyah. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksinasi Covid 19. *Molucca Medica*, 13(2), 52–59. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamedica/article/view/2497/2312>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi* (1st ed.). Kencana Pranada Media Group.
- Bungin, B. (2017). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Dwianto, A. R. (2020). *Masuki New Normal, Hindari 5 Kebiasaan Ini agar Kekebalan Tubuh Tak Menurun*. DetikHealth Rabu, 27.
- Penyimpanan, P., Di, V. C.-, Puskesmas, S., Sakit, R., Drs, O., & Bukittinggi, M. H. (2023). *Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi Submitted : March 3 , 2023 ; Accepted : March 28 , 2023 JP : Jurnal Pharmacopoeia PENDAHULUAN Covid-19 (Corona virus disease 19) adalah suatu penyakit yang mudah menular disebabkan oleh virus varian baru Severe Ac. 2(1), 41–53.*
- Rahayu, H. S. (2023). *Straegi Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Pandemi Covid-19*. 3(1), 45–50.
- Saryono, & Anggraeni, D. M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Syakti, P. M., Purwanti, D., & Sampurna, R. H. (2023). Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 22–32.
- Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2022). *ROBI NURDIANSYAH*.
- Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Farmasi Pada Prodi III Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan, D. D., & Elleniyati, R. (2018). Karya Tulis Ilmiah Program Studi D Iii Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018. *Berdasarkan Permenkes*, 9.
- Wahyuni, Y., Purnamawati, D., Fauziah, M., & Putri, A. (2021). Gambaran sikap dan perilaku pencegahan penularan covid-19 di Kabupaten Sukabumi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(1), 4–8. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/10612>
- Wijaya, H. (2018). Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof.



Journal Nursing Care, 10(1) March 2024

P-ISSN : 2407-28859, E-ISSN : 2829-4238

DOI : <http://dx.doi.org/10.52365/jnc.v10i1.967>

<http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JNC/index>

Burhan Bungin). *ResearchGate*, March, 1–45.

YS Romadhona, K. S. (2018). Analisis sebaran tenaga kesehatan puskesmas di indonesia berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Manarang*.